

BAB III

KONDISI DAN HAK-HAK PEREMPUAN DI MESIR SEBELUM DAN SESUDAH REVOLUSI MESIR 2011

Mesir merupakan salah satu negara di kawasan dunia Arab yang masih terikat kuat dengan budaya patriarkhi, dimana patriarki merupakan perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu social. Ideologi patriarki menempatkan perempuan yang masih dianggap sebagai *the second class* yang sering disebut sebagai “warga kelas dua” yang keberadaannya dalam kehidupan sosial dan politik terlihat sangat termajinalkan.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, nyatanya Mesir merupakan negara muslim yang cukup fleksibel dalam pemberian hak-hak bagi kaum wanita, terlebih Mesir juga merupakan Negara demokrasi yang memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi semua warga negaranya. Perbedaan kebebasan wanita di Mesir dengan di Negara-negara muslim lainnya tersebut juga dipengaruhi dan diperoleh dari usaha kaum feminis dan aktivis wanita Mesir selama berpuluh-puluh tahun.¹ Seperti Kajian pergerakan perempuan di Mesir yang dimulai pada tahun 1919 ditandai dengan munculnya aktivis feminis yang tergabung dengan *the Egyptian Feminist Union* (EFU). Akan tetapi, kondisi perempuan dan hak-haknya di berbagai aspek kehidupan seringkali mengalami

¹ Nemat Guenenna dan Nadia Wassef, *Op Cit.*

dinamika di setiap eranya khususnya yang terjadi sebelum dan sesudah Revolusi Mesir tahun 2011.

A. Kedudukan dan Hak Perempuan sebelum Revolusi Mesir 2011

Sejak era Presiden Gamal Abdul Nasser, perempuan mulai menjadi perhatian dalam bidang kehidupan walaupun belum dapat dikatakan berkembang secara progresif. Pada tahun 1956, Konstitusi baru menjamin kesetaraan bagi semua warga Negara Mesir, terlepas dari jenis kelamin, serta hak perempuan untuk memilih dan untuk berdiri untuk pemilihan di DPR². Konstitusi ini merupakan konstitusi pertama bagi Mesir dan Arab yang memberikan wanita hak untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan dan untuk mengenali kewarganegaraan perempuan. Pada tahun 1957, untuk pertama kalinya, enam perempuan menjadi kandidat untuk pemilihan dan dua dari mereka memenangkan kursi parlemen³. Antara 1956 dan 1979, perempuan mulai mengambil peran politik, mendapat keterwakilannya di Parlemen dan diangkat ke kabinet. *Nasser's 1962 socialist Charter for National Action* atau yang dikenal sebagai Piagam Sosialis Nasser untuk Aksi Nasional pada tahun 1962 mendukung adanya kesetaraan gender dan hak semua warga Negara untuk mendapat akses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.⁴ Nasser mencoba untuk menciptakan ruang politik dan ekonomi yang baru bagi perempuan. Walaupun

²Earl L Sullivan. 1986. *Women in Egyptian Public Life*. New York: Syracuse University Press hal : 33; Al-Ali, Nadjé Sadig. 2002. *The Women's Movement in Egypt, with Selected References to Turkey*. UNRISD, *Civil Society and Social Movements Programme*, no.5 (April). Hal: 7

³ Hassan, Farkhonda, Sahar Nasr and Maya Morsy. 2009. *Gender Equality creates Democracy*. Cairo: National Council for Women Hal :41

⁴ Nikki R Keddie. 2007. *Women in the Middle East: Past and Present*. Princeton University Press: United States of America. Hal: 123

rezim Nasser telah membuka peluang bagi kemajuan public untuk wanita, rezim masih tidak mempersoalkan struktur keluarga, kekuasaan dan budaya patriarki, atau hukum agama tentang keluarga. Laki-laki terus mendominasi didalam keluarga, tempat kerja, dan pemerintahan.⁵ Botman melihat bahwa identitas perempuan masih dibatasi oleh struktur sosial dan politik patriarki.⁶

Eksistensi wanita juga mulai berkembang diperhatikan di ruang publik dan dunia intelektual, kehidupan sosial, dan pengalaman profesional untuk melanjutkan aktivisme mereka di bawah kekuasaan Sadat. Namun, pada Konstitusi 1971 di era Anwar Sadat, Konstitusi Mesir, membatalkan hukum kesetaraan perempuan yang telah dijamin di bawah rezim Nasser, dan memungkinkan kesetaraan gender hanya jika hal itu tidak bertentangan dengan aturan hukum Syariah. Konstitusi 1971 menyatakan: “Negara menjamin keseimbangan dan kesepakatan antara tugas seorang wanita terhadap keluarganya, di satu sisi, dan terhadap pekerjaannya dalam masyarakat dan kesetaraan nya dengan pria di bidang politik, sosial, dan budaya, di sisi lain , tanpa melanggar hukum syariat Islam.”

Adanya alasan hubungan internasional pada 1970-an kemudian, Sadat mulai mendorong hak-hak perempuan, sebagian. *Infitah* Sadat merupakan kebijakan (“pintu terbuka”), pemulihan hubungan dengan Amerika Serikat, yang kuat retorika pro-Barat, dan perjuangan terus-menerus untuk menumbuhkan reputasi global sebagai upaya modernisasi, semua memainkan peran dalam

⁵ Loc Cit.

⁶ Selma Botman. 1999. *Engendering Citizenship in Egypt*. Columbia University Press. Hal :81

dukungannya terhadap hak-hak perempuan. Sadat ingin menjaga citra Mesir ke luar negeri tanpa menyerahkan kekuasaan politiknya untuk Islam, yang merupakan agama mayoritas di Mesir.⁷ Dalam langkah paradoks lain, DPR, melalui UU Nomor 21 tahun 1979, memberikan kuota bagi perempuan di parlemen, mengalokasikan tiga puluh kursi tambahan bagi perempuan di Majelis al-Shaab (Majelis Rakyat), kehadiran perempuan di DPR mencapai 9 persen pada tahun 1979-1984⁸.

Dekade PBB mengenai Perempuan pada tahun 1975-1985, mendatangkan tekanan dari kelompok feminis Mesir dan internasional, dan advokasi hak-hak perempuan Mesir. Jihan Sadat yang merupakan istri dari Anwar Sadat juga mendorong rezim untuk mempromosikan isu-isu gender. Sadat mendirikan Organisasi Perempuan Mesir dan Komnas Perempuan untuk menangani keluarga berencana, buta huruf, dan kesejahteraan anak. Pada saat yang sama Jihan, mengatur organisasi kesejahteraan perempuan dan memulai serangkaian reformasi, yang dikenal sebagai “*Jihan Laws*” yang didalamnya mengatur pemberian hak-hak hukum dalam pernikahan, poligami, perceraian, dan hak asuh anak perempuan. Meskipun perjuangan pribadi Jihan Sadat untuk sistem kesejahteraan yang lebih baik untuk negara dan kesetaraan gender, ia diidentifikasi pro dengan elitisme Barat. “*Jihan Laws*” dianggap inkonstitusional dengan alasan prosedural dan karena itu tidak sah. Campuran Jihan Sadat dalam Hukum Status Pribadi dianggap sebagai bukti utama

⁷Nadia Sonneveld. 2009. *Khul' divorce in Egypt: public debates, judicial practices, and everyday life*. PhD diss., University of Amsterdam. Hal : 34

⁸ Hassan, Nasr, dan Morsy. *Op Cit*. Hal : 42.

konspirasi terhadap syariat. Ketika rezim kehilangan dukungan dari rakyat, gerakan perempuan menderita sebagai hasilnya.

Di akhir Rezim Sadat pada tahun 1981, Mesir mulai menegaskan keseriusannya dalam memberikan hak-hak terhadap kaum wanita dengan menandatangani Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Pemerintah Mesir meratifikasi artikel/pasal yang bisa bertentangan dengan syariat dan norma-norma sosial Mesir, tetapi melakukannya dengan reservations.⁹ Namun, berakhirnya era Sadat, perempuan masih kekurangan organisasi independen yang kuat dan masih ada program yang tidak ditujukan untuk keadaan umum dalam mempromosikan hak-hak perempuan.¹⁰

Dengan diratifikasinya CEDAW berarti bahwa Mesir berkomitmen untuk menciptakan sebuah langkah yang signifikan secara politik, yang menunjukkan kesediaan Mesir untuk mengadopsi beberapa norma-norma dan nilai-nilai yang diakui di tingkat internasional untuk kemajuan perempuan. Perjuangan untuk membela hak-hak perempuan Mesir setelah ratifikasi CEDAW dan berakhirnya era Sadat digantikan oleh rezim Husni Mubarak.

Pada era Mubarak, perdebatan politik tetap berlabuh pada masalah pemberian hak-hak terhadap perempuan. Mubarak menghadapi tantangan yang sama dengan apa yang dihadapi Sadat. Rezim ingin tampil reformis dan progresif terhadap isu-isu perempuan tetapi melakukannya ketika mencoba

⁹ Sonneveld, Nadia. Op Cit

¹⁰ Al-Ali. Op Cit

untuk membuang perempuan untuk sela-sela arus utama politik.¹¹ Di bawah rezim Mubarak, peran wanita dapat dikatakan cukup berkembang. Wanita di Mesir memiliki kebebasan untuk dapat bekerja, menempuh pendidikan, dan bahkan untuk memperoleh kursi di parlemen.¹²

Di bawah konstitusi 1979 yang telah diamandemen tahun 2007, Mesir juga masih mempertahankan hak-hak kesetaraan terhadap warga negaranya. Misalnya pada pasal 5, 8 dan 40 berikut :¹³

Article 5

The political system of the Arab Republic of Egypt is a multiparty one, within the framework of the basic elements and principles of the Egyptian society as stipulated in the Constitution. Political parties are regulated by the law

The citizens have the right to establish political parties according to the law. It is prohibited, however, to exercise any political activity or to found any political party based on religious considerations or on discrimination on grounds of gender or race.

Article 8

The State shall guarantee equality of opportunity to all citizens.

Article 40

¹¹ Selma Botman. Op Cit. Hal : 92

¹² Sally Baden, "The position of women in Islamic countries: possibilities, constraints and strategies for change" dalam *BRIDGE (Development-Gender); Report No.4*, (Brighton: Institute of Development Studies, September 1992), Hal : 31.

¹³ The Constitution Of The Arab Republic Of Egypt, 1971 (As Amended To 2007)

All citizens are equal before the law. They have equal rights and duties without discrimination between them due to race, ethnic .origin, language, religion or creed.

Dalam komitmennya, pemerintah Mesir melakukan upaya luar biasa menuju pencapaian kesetaraan perempuan di bawah hukum, pemerintah Mesir mengambil langkah di level internasional dan mencari aspirasi politik dengan menemukan sekutu di Barat¹⁴ , hal itu terlihat ketika adanya Konferensi Internasional PBB tahun 1994 tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) yang diselenggarakan di Kairo. Konferensi ini ditujukan untuk membahas topic yang tabu pada perempuan seperti aborsi, kekerasan, dan hak-hak reproduksi, serta isu-isu yang menjadi perhatian bersama, seperti persamaan di depan hukum. Pada tahun 2000 pemerintah Mesir meluncurkan Undang-Undang Status Pribadi baru. Keputusan itu dibuat atas dasar kebutuhan yang berbeda, di antaranya: “penguatan lembaga negara, menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara, membuat klaim legitimasi agama dan budaya, meningkatkan status Mesir dalam masyarakat internasional, dan mengamankan dukungan organisasi internasional.”¹⁵

Perubahan lain yang telah dibuat berkaitan dengan perempuan dalam beberapa tahun terakhir selama kontrol dari Partai Demokrat Nasional (NDP) juga terdiri dari mengangkat hakim perempuan di Dewan Pengadilan Tertinggi, amandemen hukum kewarganegaraan dan Hukum Anak yang termasuk

¹⁴ Nemat Guenenna dan Nadia Wassef. *Op Cit.* Hal : 48-49

¹⁵ Mulki Al Sharmani. *Egypt's family courts: route to empowerment? Open Democracy*, 2007.
http://www.opendemocracy.net/article/egypt_and_family_law

kecaman dari praktek *Female Genital Mutilation*, dan meningkatkan usia perkawinan minimum bagi perempuan di usia delapan belas tahun. Di bawah pemerintahan Mubarak bahkan Mesir mengangkat hakim perempuan pertamanya pada 2003 dan pada 2010 terdapat 42 hakim wanita dari sekitar 9000 jumlah keseluruhan hakim di Mesir.¹⁶

Kondisi wanita Mesir di bawah pemerintahan Mubarak pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh keberadaan ibu negara yaitu Suzanne Mubarak. Bahkan di Mesir, terdapat hukum yang mengatur tentang partisipasi wanita dalam politik dan status pribadi wanita. Hukum tersebut dikenal sebagai “Suzanne Laws” setelah istri dari Husni Mubarak yang juga pemimpin dari *National Council for Women* tersebut mengamankan kuota untuk wanita di parlemen. Hukum tersebut juga memandatkan bahwa ibu yang bercerai dapat memperoleh hak asuh anak hingga anak tersebut beranjak dewasa serta termasuk hukum yang mengatur hak mengunjungi bagi orang tua yang berpisah. Bahkan, wanita juga dimungkinkan untuk meminta proses cerai dalam pengadilan walaupun sang suami tidak menginginkan hal yang sama, atau hanya untuk meminta cerai selama sang istri mau mengembalikan mahar mereka.¹⁷

Periode 1984 – 1987 merupakan masa keemasan bagi tercapainya keterwakilan perempuan tertinggi di tingkat parlemen dalam sejarah perpolitikan nasional Mesir. Pasca pencabutan kuota bagi perempuan yang

¹⁶ Aliaa Dawoud, “Why Women are Losing Rights in Post-Revolutionary Egypt” dalam *Journal of International Women’s Studies*, Vol 13, 5 Oktober 2012, hlm. 163.

¹⁷ Alona Ferber, *Op Cit*.

diterapkan pada tahun 1986, tingkat keterwakilan perempuan di parlemen mulai mengalami pasang surut. Namun demikian, di bawah Mubarak, representasi politik perempuan di parlemen tetap hampir tidak signifikan.¹⁸

Pada dasarnya, di bawah rezim Mubarak, peran wanita dapat dikatakan cukup berkembang. Wanita di Mesir memiliki kebebasan untuk dapat bekerja, menempuh pendidikan, dan bahkan untuk memperoleh kursi di parlemen.¹⁹ Namun, selama 30 tahun menjabat hingga tahun 2011 lalu, di era Mubarak masih terjadi dinamika dalam pemberian hak-hak terhadap kaum perempuan dan perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender pula masih belum berakhir sampai terjadinya penggulingan dirinya dalam Revolusi Mesir tahun 2011.

B. Kedudukan dan Hak Perempuan setelah Revolusi Mesir 2011

Turunnya Husni Mubarak dari kursi kepemimpinan negara Mesir pada dasarnya pencapaian besar bagi masyarakat Mesir. Hal tersebut memanglah tujuan utama dari segala gelombang pergerakan rakyat besar-besaran yang telah berlangsung selama sehari-hari. Tergulingnya rezim pemerintahan otoriter Mubarak tentunya menghadirkan harapan akan terciptanya perubahan bagi kondisi kehidupan mereka, tidak terkecuali pada kaum wanita.

Setelah partisipasi mereka yang luar biasa dalam usaha revolusi pemerintahan, tergulingnya rezim Mubarak tentunya memberikan ekspektasi dan harapan akan membaiknya kondisi wanita di Mesir. Demokratisasi ini

¹⁸ Mustafa, Hala, Abd al-Ghaffar Shukor and Amre Hashem Rabi. 2005. Building Democracy in Egypt: Women's Political Participation, Political Party Life and Democratic elections. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) and the Arab NGO Network for Development (ANND) Hal : 10

¹⁹ Sally Baden. *Op Cit*

memberikan harapan pada wanita Mesir bahwa kebebasan dan hak-hak mereka akan semakin terjamin. Wanita merasa bahwa demokratisasi ini akan dapat mewujudkan tercapainya kesetaraan gender di Mesir.

Setelah dipimpin oleh pemerintahan rezim Mubarak selama 30 tahun, pemerintahan Mesir diambil alih oleh Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata atau *Supreme Council on the Armed Forces*. Waylen menjelaskan, “setelah transisi dimulai dan partai-partai politik telah dibentuk kembali dan melanjutkan kegiatan mereka, fokus cenderung menggeserkan organisasi perempuan dan gerakan sosial pada umumnya dan menuju bentuk yang lebih konvensional dari lembaga politik, terutama ketika pembukaan masa transisi dikendalikan oleh militer.”²⁰

Mesir dibawah SCAF semakin memperburuk posisi wanita di Mesir pasca runtuhnya rezim Mubarak. Sebagai contoh, kuota 64 kursi parlemen atau yang setara dengan 12% nyatanya dibatalkan pada Juli 2011.²¹ Kebijakan ini digantikan dengan amandemen pada hukum electoral yang menghimbau seluruh partai untuk memiliki setidaknya 1 orang kandidat wanita.²² Dan pada tahap pertama pemilihan, dari 376 kandidat wanita yang ada, tidak satupun yang terpilih.²³ Menurut Amnesty Internasional, perubahan kebijakan ini memperlihatkan sebuah kegagalan besar dalam penjaminan partisipasi politik wanita di negara tersebut.²⁴

²⁰ Georgina Waylen. 1994. Women and Democratization: Conceptualizing gender relations in Transition Politics. *World Politics* 46, no. 3 (April): 327-354.

²¹ Alona Ferber, *Op Cit*

²² *Loc Cit*

²³ *Loc Cit*

²⁴ Amnesty Internasional, *Op Cit*

Pada tanggal 30 Juni 2012 Mohammed Morsi dengan politik Ikhwanul Muslimin, Kebebasan dan Partai Keadilan, menjadi presiden pertama yang terpilih secara demokratis di Mesir. SCAF dibubarkan segera setelah itu; sebuah tanda bahwa perubahan berarti yang terjadi dalam lembaga-lembaga pemerintah. Morsi menunjuk dua orang perempuan di kabinetnya. Konstitusi 2012 Republik Arab Mesir, perempuan hampir seluruhnya terhapus dari kehidupan publik.

Pasal 219 dalam konstitusi 2012 meresmikan hukum Syariah sebagai landasan utama untuk hukum negara. Di bawah hukum Syariah, peran wanita dibatasi dan hal itu tidak sejalan dengan hak-hak dasar mereka yang telah dijamin di bawah hukum internasional. Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia, misalnya, dapat menjadi usang dalam keadaan yang mengakui interpretasi konservatif dari hukum Syariah.

Sejak naiknya Mohammad Morsi yang merupakan salah satu bagian dari kelompok Muslim Brotherhood sebagai Presiden pertama pasca revolusi, nyatanya kelompok Muslim Brotherhood/Ikhwanul Muslimin mendominasi pemerintahan Mesir. Hal inilah yang banyak mempengaruhi peran wanita pasca revolusi pemerintahan Mesir 2011 lalu. Di bawah dominasi dan pemerintahan kelompok Muslim Brotherhood, segala hal tentang wanita yang terkandung dalam “Suzanne Laws” dihapuskan karena dirasa sebagai salah satu perangkat dan bagian dari rezim Mubarak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Azza Kamel, seorang aktivis wanita di Mesir yang menyatakan bahwa pasca revolusi kebanyakan masyarakat Mesir, terutama kelompok Islamis,

berusaha mengambil kembali hak-hak yang selama sebelum revolusi telah diperjuangkan dan didapatkan oleh wanita, berusaha mengubah hukum mengenai perceraian dan hak asuh anak, memaksakan FGM (*Female Genital Mutilation*), dan mengubah usia seorang wanita untuk menikah dari 18 tahun menjadi 9 tahun. Wanita justru menghadapi sebuah tantangan baru dari dominasi Muslim Brotherhood di Mesir karena pada dasarnya Muslim Brotherhood membatasi peran wanita di negara tersebut. Muslim Brotherhood juga mendukung praktek patriarki yang merugikan wanita. Walaupun sebenarnya prinsip kesetaraan untuk semua warga Negara masih tercantum di dalam konstitusi akan tetapi sepertinya hal tersebut hanya hitam diatas kertas, perempuan setelah revolusi 2011 masih harus berjuang untuk mendapatkan haknya secara utuh.

C. Diskriminasi yang terjadi terhadap Kaum Perempuan di Mesir

Berdasarkan *Convention on the Elimination of all forms Discrimination Against Women* Pasal 1 istilah: “diskriminasi terhadap perempuan” berarti segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Seperti yang telah diketahui bahwa sejak tahun 1956 Undang-Undang Mesir menjamin kaum perempuan memiliki hak pilih penuh dan setara dengan kaum

pria, perempuan sedikit demi sedikit diberikan peluang untuk dapat berpartisipasi dan berhak menjalani kehidupan sebagaimana kaum laki-laki, hal tersebut menjadi sebuah dasar hukum yang kuat bagi hak-hak asasi perempuan di Mesir. Walaupun Negara telah menjamin persamaan hak antar perempuan dan laki-laki dalam sebuah konstitusi Mesir di berbagai rezim kepemimpinan, namun nyata diskriminasi masih terjadi pada kaum perempuan di beberapa aspek kehidupan dan kurangnya mekanisme implementasi yang tepat untuk menjamin akses yang sama bagi kaum perempuan terhadap keadilan dan hukum.

C.1 Partisipasi Politik

Selama masa tiga presiden sebelum revolusi 2011, partisipasi politik perempuan tidak memenuhi aspirasi nasionalistis dari perjuangan untuk kemerdekaan pada tahun 1919.²⁵ Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa hak-hak sipil dan politik yang dijamin untuk wanita di bawah kekuasaan presiden sebelum dan setelah revolusi 2011, status mereka jelas tetap subordinasi dalam urusan keluarga.

Dengan demikian, dapat dipertanyakan sejauh mana partai-partai politik telah benar-benar perhatian pada isu partisipasi politik perempuan, baik di dalam partai atau di luar melalui pencalonan pada daftar pemilih. Selama rezim Presiden Hosni Mubarak misalnya, kuota keterwakilan perempuan dipandang masih tidak adil. Juga, posisi calon anggota legislatif kaum perempuan yang banyak berada dalam urutan bawah menyebabkan peluang kaum perempuan

²⁵ Mustafa, Hala, Abd al-Ghaffar Shukor and Amre Hashem Rabi, Op Cit. Hal : 24.

untuk menduduki kursi parlemen menjadi semakin kecil. Kondisi tersebut dialami baik oleh calon anggota legislatif kelompok perempuan yang berasal dari partai Islam maupun liberal.²⁶

Keterwakilan perempuan dalam badan-badan terpilih bervariasi, tetapi umumnya masih bersifat marginal, berfluktuasi antara 0,5 - 2,4 persen. Keterwakilan perempuan dan partisipasi politiknya cenderung mengalami pasang surut yang bahkan jumlahnya tidak signifikan

Tabel 3.1.
Dinamika Keterwakilan Perempuan di Parlemen Mesir

Tahun	Jumlah Perempuan Yang Terpilih Dalam Pemilu	Jumlah Perempuan Yang Ditunjuk Presiden	Total Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen
1979 (11 November-21 April)	4	2	1,6%
1979 (23 Juni-20 Maret 1984)	33	2	9,7%
1984-1987	35	1	7,8%
1987-1990	14	4	3,9%
1990-1995	7	3	2,2%
1995-2000	9	4	2%
2000-2005	7	4	2,4%
2005-2010	4	5	2%
2010	65	1	13%
2011/2012	7	2	2,2%

Sumber: data dikutip dari Rabi'e (2012) dan Tadros (2010) dalam <http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/INF30.pdf>, diakses 15 April 2017

Data tersebut menunjukkan bahwa hak-hak yang telah ada untuk perempuan sebelum dan setelah Revolusi 2011 masih tidak sejalan dengan implikasi yang terjadi pada wanita dalam partisipasi politik. Revolusi 2011 yang diharapkan

²⁶ Bringing Gender Justice to the Egyptian Parliament dalam <http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/INF30.pdf> diakses 15 April 2016

dapat memberikan kemajuan yang signifikan bagi kedudukan perempuan tidak terkecuali di parlemen ternyata tidak mengubah rendahnya tingkat keterwakilan perempuan di parlemen bahkan semakin memburuk. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 64 kursi parlemen atau yang setara dengan 12% untuk perempuan nyatanya dibatalkan pada Juli 2011. Berdasarkan Global Gender Gap index Report tahun 2012 mengenai pemberdayaan politik, Mesir menduduki peringkat ke 125 dari 135 negara dengan angka perbandingan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Sub Index Global Gender Gap 2012 (Political Empowerment)

	Peringkat	Nilai	Rata-rata Sample	Jumlah perempuan	Jumlah Laki-laki	Rasio Perempuan-Laki-laki
Pemberdayaan Politik	125	0,035	0,196			
Perempuan Dalam Parlemen	128	0,02	0,23	2	98	0,02
Perempuan dalam Kabinet	95	0,12	0,19	10	90	0,12
Kandidat Kepala Negara	58	0,09	0,17	0	50	0,00

Sumber : *World Economic Forum Global Gender Gap Report 2012*
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2012/#section=country-profiles-126_egypt_gggr12 diakses 17 April 2017

Angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan dalam partisipasi politik di berbagai macam kedudukan politik masih dalam jumlah yang rendah. Akar diskriminasi terhadap perempuan yang berlangsung secara sistematis dalam kurun waktu yang lama menjadi faktor penghambat tingkat partisipasi perempuan dalam kehidupan politik di Mesir.

C.2. Ekonomi dan Sosial

Di balik segala kemajuan yang sebenarnya telah dirasakan oleh wanita Mesir secara konstusional, nyatanya kesetaraan status antara wanita dan pria masih sulit untuk dicapai. Jumlah keterlibatan perempuan yang signifikan dalam Revolusi Mesir Juni 2011 di Tahrir Square untuk menggulingkan rezim Mubarak juga mengindikasikan bahwa perempuan pada dasarnya masih kehilangan hak-haknya tidak hanya dalam politik akan tetapi perempuan mengalami diskriminasi di kehidupan ekonomi dan sosial.

Diskriminasi berbasis gender masih terjadi dan eksis dalam kehidupan masyarakat Mesir. Dalam sektor ekonomi dan pekerjaan, diskriminasi dalam bentuk penerimaan upah atas jenis kerja yang sama masih terjadi. Jumlah penerimaan upah yang diterima oleh wanita nyatanya lebih kecil dibanding dengan apa yang diterima oleh pria pada pekerjaan yang sama. Tingkat kemiskinan di provinsi Mesir bagian atas (*Upper Egypt*) jauh lebih tinggi daripada di Mesir bagian bawah (*Lower Egypt*), karena norma budaya, sosial dan agama menghalangi perempuan di daerah pedesaan untuk memanfaatkan peluang kerja di luar rumah. Mereka juga dirugikan oleh diskriminasi gender dalam upah dan kondisi kerja. Menurut Laporan Pembangunan Manusia Mesir 2008, bagian *Upper Egypt* dari negara yang sangat miskin adalah 66 persen, dengan hampir 95 persen desa termiskin yang berada di Mesir Bagian Atas dan hal tersebut berpengaruh pada kondisi ekonomi kaum perempuan. Menurut laporan Badan Pusat Sensus dan Statistik Mesir tahun 2012, perempuan terdaftar secara resmi hanya terdiri dari 23 persen dari angkatan kerja formal.

Tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu proporsi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan di kalangan wanita berusia 15 dan di atas hanya 22 persen, sedangkan sesuai persentase untuk pria adalah 75 persen.²⁷ Dalam sub index Global Gender Gap Report 2015 mengenai partisipasi dan kesempatan ekonomi, Mesir menduduki peringkat 135 dari 145 negara dengan jumlah ketenagakerjaan perempuan 26% sedangkan ketenagakerjaan laki-laki sebanyak 79%.

Pada dasarnya angka partisipasi ekonomi perempuan di tahun ke tahun tidak mengalami jumlah yang signifikan seperti laki-laki. Isu-isu diskriminasi perempuan dalam kehidupan sosial juga nyatanya masih eksis dan terjadi berkali-kali dan mengobarkan kaum perempuan, seperti perkosaan , perdagangan manusia , pelecehan seksual, kekerasan perempuan, mutilasi alat genital pada wanita (*female genital mutilation*), pemaksaan tes keperawanan pada wanita, dan hal-hal serupa lainnya. Harapan perempuan akan hak-hak yang lebih baik dan penghapusan diskriminasi terhadap mereka setelah Revolusi 2011 nyatanya hanya sebuah mimpi yang tidak tercapai. Setelah Revolusi 2011, perilaku-perilaku diskriminasi justru membuat keadaan perempuan semakin parah.

Diskriminasi dan kekerasan berbasis gender telah menjadi masalah yang semakin umum di Mesir. Dalam beberapa tahun terakhir, pelecehan seksual dan kekerasan telah mencapai jumlah yang signifikan. Kairo, khususnya, telah

²⁷ EGYPT MENA Gender Equality Profile : Status of Girls and Women in the Middle East and North Africa . 2011. dalam <https://www.unicef.org/gender/files/Egypt-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf> diakses 17 April 2017

menjadi terkenal sebagai tempat yang berbahaya bagi perempuan untuk berjalan, baik itu dalam sebuah kelompok maupun individual. Perempuan di Mesir seperti menderita mimpi buruk setiap hari ketika mereka pergi keluar. Perempuan menjadi target dari pelecehan seksual setiap hari di jalan-jalan, transportasi publik, toko-toko, pasar, sekolah, universitas, klub, tempat-tempat wisata dan tempat kerja. Tidak ada angka resmi tentang pelecehan seksual karena sebagian besar kasus tidak dilaporkan, sehingga sulit untuk mengevaluasi prevalensi dengan ketepatan.

Namun, sebuah studi UN Women tahun 2013 melaporkan bahwa 96,5% dari wanita disurvei telah secara fisik dianiaya ,disentuh, diraba-raba, diperkosa oleh laki-laki di tempat umum. 95,5% wanita melaporkan telah dilecehkan secara verbal. Studi ini menyatakan bahwa area utama di mana pelecehan seksual berlangsung adalah jalan umum (89,3% dari mereka yang diwawancarai) dan transportasi umum (81,8% dari yang diwawancarai). Kemudian 19,2% dari mereka mengatakan bahwa pelecehan seksual tersebut terjadi setiap minggu , 7.3% menyatakan terjadi secara bulanan sedangkan 68,9% menyatakan terjadi setiap waktu. Mayoritas dari mereka mengatakan pria dari segala usia terlibat sebagai pelaku pelecehan tersebut . Sebuah studi yang diterbitkan oleh *Egyptian Center for Women's Right* pada tahun 2008 ditemukan bahwa 86% pria yang diwawancarai mengaku telah melecehkan wanita secara seksual dan 83% wanita (termasuk wanita asing yang tinggal di Mesir) telah mengalami pelecehan seksual dan 46% mengalaminya setiap hari.

Kekerasan sehari-hari tersebut memiliki konsekuensi serius bagi kebebasan ruang gerak perempuan , termasuk penggunaan angkutan umum, akan keluar selama libur umum, berjalan di jalan-jalan setelah gelap, atau pergi keluar di jalan sama sekali. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga juga kerap terjadi pada perempuan.

Amnesty International menggambarkan kekerasan fisik dan psikologis dilakukan secara brutal, pasangan rumah tangga dalam hal ini perempuan telah dipukuli, dicambuk dan dibakar serta dalam beberapa kasus mengunci mereka di dalam rumah. Sistem hukum yang mengatur tentang hal tersebut gagal dalam menjamin keselamatan dan perlindungan kaum perempuan dalam berbagai macam kekerasan. Mulai dari hukum pidana yang tidak memadai dan aparat hukum yang tidak peduli dengan kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual serta hukum status pribadi Mesir yang diskriminatif. Hal ini menyebabkan banyak wanita mengalami kekerasan dan menderita dalam diam.

28

Harapan untuk kesetaraan gender dengan cepat digencarkan namun kekerasan terhadap perempuan di jalan tidak hanya dilanjutkan atau bahkan ditangani, tetapi meningkat ke level belum pernah terjadi sebelumnya. Momen tersebut terjadi ketika perempuan yang kembali ke jalan untuk mengekspresikan harapan mereka untuk kesetaraan gender pada Hari Perempuan Internasional 8

²⁸ Amnesty Internasional, 20 Januari 2015. "*Circles of hell: Domestic, Public and State Violence Against Women in Egypt*" dalam <http://www.amnestyusa.org/research/reports/circles-of-hell-domestic-public-and-state-violence-against-women-in-egypt> diakses 17 April 2017

Maret 2011 yang tidak lama dari aksi demonstrasi Revolusi Januari 2011 bertemu dengan kekerasan ekstrim dan pelecehan tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi oleh pengunjuk rasa lainnya. Hari berikutnya, delapan belas demonstran perempuan ditangkap, diancam dengan tuduhan palsu termasuk prostitusi, dipukuli dan disiksa dengan listrik, dan dipaksa untuk menyerahkan tes keperawanan di tangan seorang dokter militer²⁹

Adanya praktek Female Genital Mutilation juga semakin memperparah keadaan kaum perempuan. *Female Genital Mutilation* merupakan tindakan ilegal di Mesir tapi masih sangat umum. Praktek ini pertama dilarang pada tahun 1997 meskipun hukum menawarkan celah yang memungkinkan FGM terjadi ketika itu dianggap “keperluan medis”. Pada tahun 2008 larangan penuh telah disetujui dan menjadikan FGM sebagai kriminalisasi, tapi tidak ada pelaku yang telah dihukum karena melanggar larangan menurut laporan *Freedom House report Women’s Rights in the Middle East and North Africa* tahun 2010. Prevalensi FGM di kalangan wanita usia 15-49 adalah 91 persen menurut DHS 2008. Meskipun perempuan perkotaan cenderung akan dipotong dari perempuan pedesaan, praktek tersebar luas di kedua daerah dengan prevalensi 96 persen di daerah pedesaan dan 85 persen di daerah perkotaan. Beberapa perempuan disunat setelah usia 15 (usia paling umum dari sunat adalah 9 sampai 10 tahun), dan ketika membandingkan tingkat FGM oleh kelompok usia,

²⁹ Amnesty International, (03/23/2011) *Egyptian women protesters forced to take ‘virginity tests’*, <http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/egyptian-women-protesters-forced-to-take-virginity-tests-2011-03-23> diakses 17 April 2017

tingkat yang lebih rendah ditemukan pada kelompok usia perempuan 15-19 dan 20-24 (81 dan 87 persen, masing-masing) dibandingkan kelompok usia perempuan antara 25-49 (di mana 94-96 persen perempuan telah menjadi korban FGM).³⁰

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Thomas Reuters Foundation pada tahun 2013. Mesir menempati urutan terakhir di antara 22 negara di Timur Tengah sebagai Negara terburuk untuk perempuan.³¹ Sejak sebelum Revolusi 2011 sampai dengan pasca Revolusi 2011, Mesir menempati peringkat yang tidak cukup baik dalam *Global Gender Gap Report* yang dilakukan oleh World Economic Forum. Misalnya pada tahun 2015, Mesir menempati peringkat 136 dari 145 negara dalam Global Gender Gap Index dengan angka 0,599 yang berarti menjadikan Mesir termasuk dalam Negara sepuluh terburuk dalam kesetaraan Gender.³² Peringkat tersebut menunjukkan bahwa Mesir merupakan Negara yang mengalami kesenjangan yang cukup berarti dalam memberikan kesempatan dan pembagian sumber daya terhadap kaum perempuan dan laki-

³⁰ El Zanaty, Fatma dan Ann Way.2009. Egypt Demographic and Health Survey 2008. Cairo, Egypt, Ministry of Health. El Zanaty and associates dan Macro International

³¹ POLL-Egypt is worst Arab state for women, Comoros best, 12 November 2013 dalam <http://news.trust.org/item/20131108170910-qacvu/?source=spotlight-writaw>; diakses 16 April 2017

³² Global Gender Gap merupakan penilaian terhadap negara pada seberapa baik suatu negara membagi sumber daya mereka dan kesempatan antara populasi laki-laki dan perempuan, terlepas dari tingkat keseluruhan sumber daya dan peluang dan sebagai salah satu pengukur terhadap kesetaraan gender. Penilaian tersebut dilakukan dengan melihat tingkat partisipasi dan kesempatan ekonomi, pencapaian pendidikan, Kesehatan dan kelangsungan hidup serta pemberdayaan politik. <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report2016/measuring-the-global-gender-gap/> diakses 16 April 2017.

laki. Penilaian tersebut dilakukan dengan melihat tingkat partisipasi dan kesempatan ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup dan pemberdayaan politik pada laki-laki dan perempuan, dimana sebagian besar kesempatan dan pembagian sumber daya tersebut diberikan kepada kaum laki-laki.

Mengingat kejadian diskriminasi yang terjadi pada kaum perempuan dalam beberapa kasus sebelum dan setelah Revolusi 2011 mengindikasikan bahwa kesetaraan gender yang sebenarnya dipertimbangkan dalam konstitusi nyatanya gagal dalam menangani isu-isu diskriminasi perempuan.